

Pandangan Muhammadiyah Terkait Kepulangan Mantan Kombatans ISIS

Rabu, 12-02-2020

MUHAMMADIYAH.ID, YOGYAKARTA- Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pada Rabu (12/2) melakukan kunjungan ke Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta yang disambut dengan hangat oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir. Kunjungan tersebut dalam misi membahas beberapa persoalan global dari masalah kemerdekaan Palestina, sampai nasib kepulangan mantan simpatisan ISIS ke tanah air.

“Kita mendukung untuk menolak keberadaan ISIS, dimana pun. Baik yang ada di Timur Tengah, apalagi sampai masuk Indonesia. Islam Indonesia ini harus dibebaskan dari kecenderungan paham radikal-ekstrem dalam bentuk apapun. Telah kami sampaikan dan diskusikan tadi dengan bu Menlu,” tegas Haedar Nashir yang disampaikan selepas pertemuan dengan Menlu Retno Marsudi.

Haedar juga menegaskan bahwa Muhammadiyah dan pemerintah Indonesia satu pandangan bahwa ISIS merupakan organisasi terlarang yang memiliki ideologi ekstrem. Akan tetapi sejak ISIS dibombardir dan mulai lenyap, gelombang ratusan kombatans ISIS telah menyerahkan diri dan ribuan warga sipil telah eksodus ke kamp pengungsian.

Permasalahan utama yang segera timbul adalah menyangkut nasib eks kombatans ISIS, yang umumnya berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Di tanah air, wacana kepulangan kombatans ISIS ini kemudian menjadi perdebatan baru yang melahirkan pro-kontra.

“Kalau Muhammadiyah membagi dua hal, satu yang kombatans ISIS dan memang mereka sudah tidak lagi WNI, ya, pemerintah sudah mengambil jalan yang pas untuk tidak memulangkan mereka. Tapi perlu dibuka opsi bagi anak-anak dan perempuan yang jadi korban. Atau mereka yang mau kembali tetapi dia juga secara sadar ideologinya yang dulu itu salah, itu bisa dibuka opsi pulang,” terang Haedar.

Haedar menawarkan agar opsi pulang harus melalui prosedur semacam karantina ideologis. Hal tersebut penting dilakukan agar eks kombatans ISIS ini tidak menjadi virus baru yang menyebarkan terorisme di Indonesia. Kekhawatiran ini tentu tak berlebihan, mengingat jumlah mereka yang lebih dari 600 orang tak bisa dikatakan sedikit dan dianggap sepele. Karena itulah Haedar menilai dalam masalah ini peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sangat dibutuhkan.

“Untuk apa kita memiliki BNPT tapi kalau tidak digunakan untuk membina masyarakat yang sudah kadung radikal-ekstrem baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri. Tapi itu harus merujuk pada verifikasi data dan seleksi yang saksama. Dan Muhammadiyah siap membantu memoderasi eks

kombatan ISIS,” ujar Haedar. (**ilham**)